



PT. BPR TOELANGAN DASA
NUSANTARA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2022

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



🏠 Jl. Raya Tulangan No.3, Tulangan, Sidoarjo

☎ 031 8856226

📠 031 8851085

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Menarik minat dan kepercayaan masyarakat baik sekitar Ds. Tulangan, Ds. Tarik ,Kab. Sidoarjo dan masyarakat pada umumnya,
2. Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR,
3. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
4. Melindungi kepentingan stakeholder,
5. Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR Toelangan Dasa Nusantara
6. Menjaga kelangsungan usaha

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

3 Responsibility

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar
BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | |
|----|--|---|
| 1 | Nama | : ESTI RAHAYU, SH |
| | NIK | : 3525154411680001 |
| | Jabatan | : 0101 - Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan terkait kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas/kepengurusan dalam mencapai tujuan untuk kepentingan BPR 3. Direksi Wajib menerapkan Tata Kelola dan Prinsip GCG pd setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Ikut bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan 5. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK 7. Melaksanakan penerapan fungsi manajemen risiko 8. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi paling sedikit mencakup : etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat 9. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan 10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai peraturan perundang-undangan |
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | |
| 1 | Nama | : LINDAWATI MOESTADJAP, SE |
| | NIK | : 3374136610620002 |
| | Jabatan | : 0200 - Direktur |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas/kepengurusan dalam mencapai tujuan untuk kepentingan BPR |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan bagian-bagian di kantor Bank terutama marketing 3. Ikut bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan 4. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja naggota Direksi paling sedikit mencakup : etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat 5. Menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai ketentuan dan peraturan Pemerintah, OJK dan anggaran dasar BPR 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai peraturan perundang-undangan |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas 2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional 3. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang semakin pusat dan beragam 4. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat sesuai kebutuhan / bagiannya 5. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis | |

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris | |
|---|--|---|
| 1 | Nama | : DRA. TITIK HERNAWATI |
| | NIK | : 3517094403670005 |
| | Jabatan | : Komisaris |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan Direksi 2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR 3. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dan prinsip-prinsip GCG pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR |
| Rekomendasi Kepada Direksi | | |
| Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas | | |

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi
Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|----|--|
| 1 | Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| 2 | Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| 3 | Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : - |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

| No | Nama | NIK | Keahlian | Komite | | | Pihak Independen |
|----|------|-----|----------|--------|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | | | Audit | Pemantau Risiko | Remunerasi & Nominasi | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |
|----|--|
| 1 | Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : - |
| 2 | Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : - |
| 3 | Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : - |

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | NIK | Nominal | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|--------------------------|------------------|---------|----------------------------|
| 1 | ESTI RAHAYU, SH | 3525154411680001 | - | - |
| 2 | LINDAWATI MOESTADJAP, SE | 3374136610620002 | - | - |

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Direksi | NIK | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|--------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | ESTI RAHAYU, SH | 3525154411680001 | 0 | NIHIL | - |
| 2 | LINDAWATI MOESTADJAP, SE | 3374136610620002 | 0 | NIHIL | - |

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | NIK | Hubungan Keuangan | | |
|----|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | ESTI RAHAYU, SH | 3525154411680001 | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | LINDAWATI MOESTADJAP, SE | 3374136610620002 | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | NIK | Hubungan Keluarga | | |
|----|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | ESTI RAHAYU, SH | 3525154411680001 | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | LINDAWATI MOESTADJAP, SE | 3374136610620002 | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Nominal | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|------------------|---------|----------------------------|
| 1 | DRA. TITIK HERNAWATI | 3517094403670005 | - | - |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | DRA. TITIK HERNAWATI | 3517094403670005 | 0 | NIHIL | - |

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Hubungan Keuangan | | |
|----|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | DRA. TITIK HERNAWATI | 3517094403670005 | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Hubungan Keluarga | | |
|----|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | DRA. TITIK HERNAWATI | 3517094403670005 | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No | Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|-------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1 | Gaji | 2 | 214.000.000 | 1 | 71.500.000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 150.000.000 | 1 | 9.600.000 |
| 3 | Tantiem | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Remunerasi lainnya | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total | | | 364.000.000 | | 81.100.000 |

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No | Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|----|--------------------------------------|---|-----------------|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1 | Perumahan | - | - |
| 2 | Transportasi | Masing-masing Direksi mendapat fasilitas transportasi berupa 1Unit Mobil Avanza | - |
| 3 | Asuransi Kesehatan | BPJS Kesehatan | - |
| 4 | Fasilitas lainnya | - | - |

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

| Keterangan | Perbandingan | |
|--|--------------|---|
| | (a/b) | 1 |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 2,30 | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1,25 | 1 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,00 | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 2,38 | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) | 2,60 | 1 |

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|----|---------------|----------------|--|
| 1 | 2022-4-12 | 3 | Agenda rapat Triwulan I Tahun 2022 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi) : 1. Pencapaian Target RBB bulan Maret 2022 2. Penerapan Prosedur kredit dan Tata Kelola 3. Penerapan Manajemen Risiko |
| 2 | 2022-8-16 | 3 | Agenda rapat Triwulan II Tahun 2022 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi) : 1. Pencapaian Target RBB bulan Juli 2022 2. Pengawasan di bidang Perkreditan 3. Tindak lanjut temuan audit intern |
| 3 | 2022-11-14 | 3 | Agenda rapat Triwulan III Tahun 2022 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi): L Pencapaian Target RBB bulan Oktober 2022 a. Realisasi pelaksanaan RBB bulan Oktober 2022 b. Ratio tingkat kesehatan bank Oktober 2022 2. Pengawasan dibidang perkreditan a. Perkembangan kolektibilitas Oktober 2022 b. Laporan kredit relaksasi COVID Oktober 2022 c. kredit Sindikasi dng Fintech PEP komunal d. Kredit bermasalah 3. Kantor Kas |
| 4 | 2022-12-6 | 3 | Agenda rapat pembahasan dan persetujuan RBB tahun 2023 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi): 1. Dana Pihak Ketiga 2. Kredit yang diberikan 3. Laba rugi 4. Inventaris 5. SDM 6. Manajemen Risiko dan Tata kelola |

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Jumlah Peserta | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | DRA. TITIK HERNAWATI | 3517094403670005 | 3 | 0 | 75,00% |

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|-----------------|------|---------------|------|---------------------|------|
| | Direksi | | Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| Total Fraud | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Telah Diselesaikan | | - | | - | | - | | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | | - | | - | | - | | - |

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| Permasalahan Hukum | Jumlah (satuan) | |
|---|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | - | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - |
| Total | - | - |

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | | Pengambil Keputusan | | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|----|--|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| | Nama | Jabatan | NIK | Nama | Jabatan | NIK | | | |
| 1 | Tubagus Mika Gideon Budiman | Keluarga Pemegang saham | 3471052702790002 | Esti Rahayu, SH | Direktur Utama | 3525154411680001 | Sewa mobil kantor | 11 | Adanya benturan kepentingan namun tidak merugikan operasional BPR |

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|--|---|------------------|
| 1 | 2022-04-21 | Sosial | Kegiatan santunan kepada anak yatim yg dilaksanakan pada bulan suci Romadhon | Panti Asuhan Al-Habibah Di Desa Kenongo | 720.000 |
| 2 | 2022-04-21 | Sosial | Memberikan bantuan sosial kepada anak yatim dan dhuafa Se- Desa Tulangan | Muslimat NU Ranting Tulangan | 500.000 |
| 3 | 2022-08-12 | Sosial | sumbangan duka cita atas meninggalnya ayahanda dr bpk Antok | pihak keluarga dr bpk Antok | 500.000 |
| 4 | 2022-09-20 | Sosial | Sumbangan duka cita atas meninggalnya Ibunda dr Ibu Lindawati Moestadjap | keluarga dari Ibu Lindawati Moestadjap | 1.000.000 |

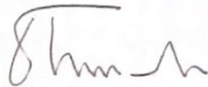
M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara tahun 2022 ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Saran dan kritik dari stake holder, dan OJK sangat kami harapkan untuk perkembangan BPR yang lebih baik lagi dikemudian hari. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara, Terima Kasih.

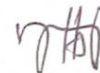
Sidoarjo, 24 Januari 2023

Persetujuan Pengurus PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara

hr



DRA. TITIK HERNAWATI
Komisaris



ESTI RAHAYU, SH
Direktur Utama

**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | |
|--|---|-----------------|------------|-----------|-------|--------------------|
| | | Struktur (S) | Proses (P) | Hasil (H) | S+P+H | Nilai Bobot Faktor |
| 1 | Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%) | 0,75 | 0,80 | 0,18 | 1,73 | 0,346 |
| 2 | Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%) | 1,17 | 1,00 | 0,30 | 2,47 | 0,370 |
| 3 | Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4 | Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%) | 1,50 | 1,20 | 0,30 | 3,00 | 0,300 |
| 5 | Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%) | 1,00 | 0,88 | 0,23 | 2,11 | 0,211 |
| 6 | Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%) | 1,10 | 0,90 | 0,20 | 2,20 | 0,220 |
| 7 | Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%) | 1,00 | 0,60 | 0,20 | 1,80 | 0,045 |
| 8 | Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%) | 1,00 | 0,92 | 0,20 | 2,12 | 0,212 |
| 9 | Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%) | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0,150 |
| 10 | Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%) | 0,84 | 0,80 | 0,20 | 1,84 | 0,138 |
| 11 | Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%) | 0,50 | 0,70 | 0,15 | 1,35 | 0,101 |
| NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | | | | | | 2,1 |

| NILAI KOMPOSIT | PERINGKAT KOMPOSIT |
|-----------------------------|--------------------|
| 1,0 <= Nilai Komposit < 1,8 | Sangat Baik |
| 1,8 <= Nilai komposit < 2,6 | Baik |
| 2,6 <= Nilai Komposit < 3,4 | Cukup Baik |
| 3,4 <= Nilai Komposit < 4,2 | Kurang Baik |
| 4,2 <= Nilai Komposit < 5,0 | Tidak Baik |

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Baik

KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
 TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|-----|--|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan | | X | | | | Sesuai dengan RUPSLB Nomor 21 Tgl. 20 Februari 2020 perihal Pengangkatan Direktur dan perpanjangan Direktur Utama dan telah didaftarkan pada Menkumham RI No. AHU-AH.01.03-0097649 |
| 2 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR | | X | | | | Dasar Penetapan POJK No. 4 /poj.03/2015 perihal penerapan tata kelola bagi BPR dan dan untuk Direktur marketing yang saat ini E-KTP masih sbg penduduk Semarang namun saat menjabat di BPR Toelangan DN saat ini sdh pindah Sbg penduduk Kota Surabaya sesuai surat keterangan domisili Nomer : 117/RT06/RW04/10/2019 |
| 3 | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan) | X | | | | | Dasar Penetapan POJK No. 4 /poj.03/2015 perihal penerapan tata kelola bagi BPR dan sesuai surat pernyataan Direksi pada saat Fit and Proper test |
| 4 | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | X | | | | | Telah sesuai ketentuan dan sesuai surat pernyataan Direksi pada saat Fit and Proper test |
| 5 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud | | X | | | | Dasar Penetapan POJK No. 4 /poj.03/2015 perihal penerapan tata kelola bagi BPR dan Direksi tidak menggunakan konsultan, dan BPR telah kerjasama dengan pihak KKMB yg merupakan mitra bisnis perihal pengurusan sertifikat tanah massal di BPN |
| 6 | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya | | X | | | | Dasar Penetapan POJK No. 4 /poj.03/2015 dan POJK No.20/POJK.03/2014 dan sesuai RUPSLB tgl 20 Februari 2020 dan telah disahkan didalam Akta Notaris no.21 tgl 20 Februari 2020 oleh notaris Ermin Yuniastuti,SH dan telah dilaporkan pada |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Menkumham Nomor AHU-AH.01.03.0097649 Selain itu BPR Toelangan DN telah menunjuk Direktur yg membawahkan fungsi kepatuhan yg telah di RUPSLB tgl 21 November 2017, serta berdasarkan surat keputusan dewan komisiner OJK No. KEP-55/KR.04/2018 perihal hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Direktur utama yg membawahi fungsi kepatuhan dan berdasarkan keputusan dewan komisiner OJK NO. 24/KR.04/2020 perihal hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Direktur |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 9 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6 | | 1,50 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,75 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas | | X | | | | Dasar Penetapan POJK No. 4 /poj.03/2015 perihal penerapan tata kelola bagi BPR dan berdasarkan job disc |
| 2 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain | | X | | | | Dasar Penetapan POJK No. 4 /poj.03/2015 perihal penerapan tata kelola bagi BPR, dan direksi menindaklanjuti temuan dari AI, KAP maupun OJK |
| 3 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris | | X | | | | Dasar Penetapan POJK No. 4 /poj.03/2015 perihal penerapan tata kelola bagi BPR |
| 4 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | | X | | | | Dasar Penetapan POJK No. 4 /poj.03/2015 dan ada risalah rapat Direksi sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Dekom, rapat direksi telah dilaksanakan setiap 1 bulan sekali kecuali ada suatu hal yang mendesak dan segera dilakukan rapat. |
| 5 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS | | X | | | | Dasar Penetapan POJK No. 4 /POJK.03/2015 dan telah tertuang didalam RUPS |
| 6 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu | | X | | | | Telah sesuai ketentuan, setiap pegawai telah di iktukan pelatihan sesuai dengan job masing2. |
| 7 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian | | X | | | | Telah sesuai ketentuan POJK No.4 /POJK.03/2015 dan dari |

| | | | | | | |
|--|---|------|----|---|---|--|
| | | | | | | hasil laporan tingkat kesehatan Bank hasil NPL s.d Desember 2022 masih sebesar 9,87% |
| 8 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | | X | | | Dasar Penetapan POJK No.4/POJK.03/2015 dan telah terpenuhi pedoman tata tertib Direksi yang dibuat pada tgl 17 Mei tahun 2018 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 16 | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8 | | 2,00 | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
| 1 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS | | X | | | Dasar Penetapan POJK no.4/POJK.03/2015 |
| 2 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian | | X | | | Dasar penetapan POJK No.4/POJK.03/2015 dan No.47/POJK.03/2017 dan semua kebijakan telah dikomunikasikan dengan seluruh karyawan apabila ada perubahan kebijakan BPR dibidang kepegawaian |
| 3 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi | | X | | | Dasar Penetapan POJK no.4/POJK.03/2015 dan dituangkan dalam risalah rapat Direksi tgl 18 Februari 2022 terkait Evaluasi kinerja bln Januari 2022 perihal evaluasi kinerja bulan Januari 2022, risalah rapat tgl 18 Maret 2022 perihal evaluasi kinerja bln Februari 2021 dan monitoring penyelesaian kredit bermasalah dan tata tertib lap kunjungan AO, Notulen rapat tgl 22 April 2022 perihal monitoring pembayaran debitur yg terdampak covid-19 dan kehati2an dim penyaluran kredit, risalah rapat tgl 13 Juli 2022 perihal penyelesaian kredit bermasalah dan target penyaluran kredit |
| 4 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders | | X | | | Terdapat tercapainya kinerja BPR ditunjukkan dengan realisasi dibanding target posisi 31 Desember 2022 tercapainya Asset 100.72 persen dan kredit yang diberikan tercapai 98.17 persen tercapai dibawah rencana kerja 1.83 persen |
| 5 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan | X | | | | Laporan tata kelola BPR tahun 2022 telah dilaporkan sesuai ketentuan POJK No 4/POJK.03/2015 |

| | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|--|
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | 9 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5 | 1,80 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | 0,18 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,73 |
| TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,346 |

KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|-----|--|-----------------|---|----|----|----|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang | | | | X | | Susunan anggota Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan , sampai dengan 31 Desember 2022 hanya ada 1 orang komisaris dan 1 orang Komut yang sudah di ajukan ke OJK per tgl 30 November 2022 dan menunggu Fit and Proper |
| 2 | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan | | | X | | | Dasar Penerapan POJK No 4/POJK.03/2015 dan untuk susunan anggota Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan , sampai dengan 31 Desember 2022 hanya ada 1 orang komisaris, sedangkan Komisaris Utama sudah diajukan ke OJK sesuai surat No. 339/TDN.03/4/VIII/2022 per tgl 30 Agustus 2022 dan menunggu Fit and Proper |
| 3 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan | | X | | | | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat berdasar RUPS. Komisaris telah lulus fit and proper berdasarkan surat keputusan dari OJK No. KEP-26/KR.04/2022 tgl 14 April 2022 dan untuk komisaris utama telah diajukan ke OJK sesuai surat No. 339/TDN.03/4/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan saat ini masih menunggu fit and proper |
| 4 | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR | | X | | | | Dasar penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 Perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR |
| 5 | BPR memiliki Komisaris Independen | | X | | | | Dasar Penerapan POJK No. 4/POJK.03/2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR |
| 6 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat | | X | | | | BPR sudah memiliki pedoman tata tertib Dewan Komisaris yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2018, namun belum dinkinikan |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|----|---|---|---|--|--|
| 7 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum | | X | | | | Dasar Penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR | |
| 8 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi | | X | | | | Dasar Penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR | |
| 9 | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen | | X | | | | Dasar Penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 | | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | | | | | | 21 | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9 | | | | | | | 2,33 | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | | | | | | 1,17 | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | | |
| 1 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | | | X | | | Dasar Penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 Perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR | |
| 2 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR | | | X | | | Dasar Penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR | |
| 3 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan | | X | | | | Dasar Penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 perihal penerapan Tata Kelola bagi BPR | |
| 4 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan | | | X | | | Dasar penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 dan BPR telah memenuhi komitmen temuan dan menyampaikan ke OJK | |
| 5 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris | | | X | | | Dasar penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 dan Rapat komisaris dilakukan dengan direksi, krn hanya ada komisaris dan komisaris utama sdh diajukan ke ojk sesuai surat No. 339/TDN.03/4/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan menunggu fit and proper | |
| 6 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat | | X | | | | Dasar Penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR | |
| 7 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS | | X | | | | Dasar Penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR | |
| 8 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi | | X | | | | Dasar Penerapan POJK No.4 /POJK.03/2015 perihal penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SEOJK No.6/SEOJK.03/2016 perihal penerapan | |

| | | | | | | | | |
|--|---|------|---|----|---|---|---|--|
| | | | | | | | fungsi kepatuhan bagi BPR | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 20 | | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8 | | 2,50 | | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 1,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C | HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris | | | X | | | Dasar Penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 perihal penerapan Tata Kelola bagi BPR | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 3 | | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 3,00 | | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,30 | | | | | | |

| | | |
|---|--|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | | 2,47 |
| TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | | 0,370 |

KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
 TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,00 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern | | | | | | |
| 2 | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko | | | | | | |
| 3 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,00 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,00 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 0,00 |
| TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,000 |

KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat | | | X | | | Dasar penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 perihal penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPR telah membuat Kebijakan Tata Kelola /GCG yang telah ditetapkan didalam SK Dir No: 020/BPR.TDN.03/SK.DIR/2015 tanggal 30 Desember 2015, namun untuk kebijakan tersendiri khusus perihal benturan kepentingan blm ada |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 3 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 3,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,50 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut | | | X | | | Dasar penetapan POJK No.4/POJK.03/2015 perihal Tata Kelola Bagi BPR |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 3 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1 | | 3,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 1,20 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik | | | X | | | Adanya benturan kepentingan dalam Sewa Kendaraan (mobil) namun tidak merugikan BPR dan telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa No. 175.A/TDN.03/4/IV/2021, selama 3 th yaitu pada tgl 23 April 2021 s.d 25 April 2024 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |

| | | |
|--|------|--|
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | 3 | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | 3,00 | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | 0,30 | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 3,00 |
| TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,300 |

KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|----|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana | | X | | | | Dasar Penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 perihal penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2016 perihal penerapan fungsi kepatuhan bagi BPR |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan | | X | | | | Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah lulus uji kompetensi berdasarkan surat keputusan dari Dewan Komisiner OJK No. KEP-55/KR.04/2018 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan |
| 3 | Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional | | X | | | | Telah sesuai ketentuan diangkat dengan SK Dir Nomor : 054/SK.Dir/TDN.03/IX/2022 pada tgl 26 September 2022 dan telah diajukan ke OJK dengan No. 382/TDN.04/IX/2022 tgl 30 September 2022. namun BPR belum mendapat surat keputusan dari OJK |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan | | X | | | | Telah sesuai Jobdisc PE Kepatuhan telah memberikan rekomendasi dan melakukan tela'ah thd kebijakan serta memberikan konsultasi kepada masing2 unit kerja (Bag. bisnis dan operasional) . |
| 5 | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan | | X | | | | Telah sesuai Jobdisc Fungsi Kepatuhan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 10 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan | | X | | | | Telah sesuai ketentuan |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|--|
| | langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya | | | | | | SEOJK No.6/SEOK.03/2016 perihal penerapan fungsi kepatuhan |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini | | | X | | | Telah sesuai ketentuan dan kedepan sosialisasi akan di intensifkan sesuai dengan perubahan peraturan terkini |
| 3 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | | X | | | | Seluruh komitmen telah sesuai ketentuan dan selanjutnya perlu ditingkatkan pencegahan terhadap penyimpangan ketentuan |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | | X | | | | kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah dikinikan sesuai ketentuan OJK |
| 5 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | | X | | | | kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah dikinikan di tahun 2022 sesuai ketentuan OJK diantaranya : Kebijakan Perkreditan, SOP Kredit, Kebijakan APU PPT, Pembaharuan SO, Kebijakan Kredit Covid - 19, revisi ke-4 pedoman kebijakan Fungsi Kepatuhan, Kebijakan Audit Internal dan Standar prosedur operasional remunerasi, struktur, KPI dan pedoman kebijakan & prosedur mengenai proses pertanggungjawaban pengeluaran biaya operasional. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 11 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5 | | 2,20 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,88 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan | | | X | | | Dari hasil kinerja BPR di tahun 2022 untuk TKS Khususnya untuk NPL masih lebih dari 5 persen , namun untuk TKS yg lain masih predikat sehat dan hampir seluruh rencana kerja tercapai sesuai target namun untuk Kredit yg diberikan dan laba berjalan blm tercapai dikarenakan adanya dampak covid - 19 dan pertumbuhan ekonomi secara menyuluh blm stabil sehingga mempengaruhi kinerja BPR di tahun 2022 |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab | | X | | | | Dasar Penerapan POJK No.4/POJK.03/215 dan |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|---|
| | secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris | | | | | | SEOJK No.6/SEOJK.03/2016 dan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur yg membawahi kepatuhan telah tertib dilaporkan ke OJK |
| 3 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Dasar Penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 perihal penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SEOJK No.6/SEOJK.03/2016 perihal penerapan fungsi kepatuhan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 7 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3 | | 2,33 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,23 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 2,11 |
| TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,211 |

KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
 TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|---|--|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern | | X | | | | Dasar penerapan sesuai SEOJK no.7 /SEOJK.03/2016 dan berdasarkan SK Direksi pengangkatan Audit Intern No.16/SK.Dir/TDN.03/XI/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan telah terdaftar di OJK berdasarkan surat No. S-72/KR.31/2016 |
| 2 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris | | X | | | | Dasar penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 7/SEOJK.03/2016 perihal standart pelaksanaan fungsi audit intern dan berdasar kebijakan prosedur Audit Internal sesuai SK Direksi No. 078/SK.Dir/TDN.03/XII/2022, Tanggal 15 Desember 2022 |
| 3 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana) | | | X | | | Dasar penerapan berdasar POJK No. 4/POJK.03/2015 perihal penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SEOJK 7/SEOJK.03/2016 perihal standart pelaksanaan fungsi audit intern bagi BPR |
| 4 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama | | X | | | | Dasar penerapan berdasar POJK No. 4/POJK.03/2015 perihal penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SEOJK 7/SEOJK.03/2016 perihal standart pelaksanaan fungsi audit intern bagi BPR |
| 5 | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern | | X | | | | Dasar penerapan POJK NO.4/POJK.03/2015, SEOJK No.7/SEOJK.03/2016 dan BPR tdk memiliki program rekrutmen namun BPR dalam menunjuk PE Audit Internal telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan telah mendapatkan saran, nasehat dan Rekomendasi dari Dewan Komisaris |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 11 | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|--|--|
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5 | | 2,20 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,10 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat | | | X | | Sudah ada kebijakan Audit Inten namun perihal untuk audit benturan kepentingan akan segera dibuatkan kebijakannya, karena kebijakan benturan kepentingan sudah tercakup didalam kebijakan tata kelola BPR(GCG) yang telah ditetapkan di dalam SK Dir No. 020/BPR.TDN.03/SK.DI R/2015, tanggal 30 Desember 2021 | |
| 2 | BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | X | | | Pihak Bank belum memakai / mengugaskan pihak ekstern untuk mengkaji ulang fungsi audit intern | |
| 3 | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit | | X | | | Dasar penerapan SEOJK No7/SEOJK.03/2016 dan Sesuai prosedur Audit Intern yg telah ditetapkan didalam SK Dir No. 078/SK.Dir/TDN.03/XII/2022 , tanggal 15 Desember 2022 dan untuk Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan sesuai dengan surat permohonan perencanaan Audit Intern th 2022 kepada Direksi dan mengetahui komisaris dengan surat No. 2/SPI/TDN.03/4/XII/2021 tgl 28 Desember 2021 | |
| 4 | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern | | X | | | Dasar penerapan SEOJK No.7 /SEOJK.03/2016 dan POJK No.47/POJK.03/2017 perihal kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM dan PE AI telah mengikuti pelatihan Audit internal pd tgl 24 Januari 2022 yang diadakan Perbarindo yg bekerjasama dengan Mandiri Consulting | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 9 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4 | | 2,25 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,90 | | | | | |

| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|
| 1 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan | | X | | | Dasar penetapan POJK No.4/POJK.03/2015 perihal penerapan Tata Kelola bagi BPR dan telah sesuai Struktur Organisasi BPR |
| 2 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | Dasar penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 , SEOJK No.7/SEOJK.03/2016 dan POJK No.75/POJK.03/2016 dan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern th 2022 telah tertib dilaporkan ke OJK berdasarkan surat No. 001/TDN.03/4/I/2022 tgl 28 Januari 2022 |
| 3 | BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | Dasar penerapan POJK No.4/POJK.03/2015 dan BPR akan melakukan kaji ulang oleh pihak ekstern kpd OJK sesuai dengan ketentuan yg berlaku |
| 4 | BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | X | | | Dasar penerapan sesuai SEOJK no.7 /SEOJK.03/2016 dan berdasar SK Direksi pengangkatan Audit Intern No.16/SK.Dir/TDN.03/XI I/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan telah terdaftar di OJK berdasarkan surat No. S-72/KR.31/2016 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 8 | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4 | | 2,00 | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 2,20 |
| TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,220 |

KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
 TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud | | X | | | | Dasar penetapan POJK No. 4/POJK.03/2015 dan POJK No.13/POJK.03/2017 dan surat penugasan Audit Ekstern berdasarkan rekomendasi dari Dewan komisaris dan PE AI serta berdasarkan RUPSLB tgl 24 Nopember 2022 perihal penunjukan penggunaan jasa akuntan publik(KAP) dalam rangka pemeriksaan general audit laporan keuangan tahun 2022 dan perjanjian kontrak kerja BPR dengan KAP R.D Anto Widiyatmoko (Akuntan Publik) |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris | X | | | | | Telah sesuai ketentuan dan berdasarkan surat Rekomendasi dari Dekom No. 31.A/DEKOM/TDN.03/4/XI/2022 dan surat Rekomendasi dari PE AI No. 004/AI/TDN.03/4/XI/2022 dan telah di RUPSLB tgl 24 Nopember 2022 |
| 2 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | X | | | | Hasil dari audit KAP dan ML tahun buku 31 Desember 2021 telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 18 Maret 2022 dengan surat No. 126/TDN.03/4/III/2022. dan untuk hasil audit KAP tahun buku 31 Desember 2022 belum terlaksana , karena baru pemeriksaan awal tahun 2023 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|---|
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 3 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2 | | 1,50 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,60 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk | | X | | | | Telah sesuai ketentuan dan berdasarkan perjanjian kontrak kerja antara BPR dan KAP |
| 2 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Telah sesuai ketentuan dan tercakup didalam hasil Laporan Auditor Independent untuk tahun buku 31 Desember 2021 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | | |

| | | |
|---|--|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | | 1,80 |
| TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | | 0,045 |

KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko | | X | | | | Dasar Penetapan POJK No.4/POJK.03/2015 dan POJK No.13/POJK.03/2015 perihal penerapan Manajemen Risiko dan SK Penunjukan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko sesuai dengan SK Dir No. 054/SK.Dir/TDN.03/IX/2022 tgl. 26 September 2022 namun belum tercatat dlm administrasi pengawasan OJK , dan BPR sudah menyampaikan surat penunjukan PE kepada OJK sesuai surat No. 382/TDN.03/4/IX/2022 |
| 2 | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko | | X | | | | Dasar penetapan POJK No4/POJK.03/2015 dan POJK No.13/POJK.03/2015 dan Telah direvisi sesuai ketentuan MR sesuai SK penetapan kebijakan Manajemen Risiko No. 022/BPR.TDN.03/DIR/V I/2019 tgl 26 Juni 2019 |
| 3 | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan | | X | | | | Dasar penerapan POJK No.13/POJK.03/2015, POJK dan POJK No.25/POJK.03/2021 dan SEQJK NO.1/SEQJK.03/2019 dan BPR Telah memiliki kebijakan Menejemen Risiko sesuai SK Dir No. 22 /BPR.TDN.03/DIR/VI/2019 tgl 26 Juni 2019 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 6 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi | | X | | | | Dasar Penetapan POJK No 13/POJK.03/2015 dan SEQJK No.1/SEOK.03/2019 dan berdasarkan SK Direksi kebijakan MR |

| | | | | | | | |
|--|---|------|----|---|---|---|---|
| | | | | | | | No.22/TDN.03/Dir/VI/20 19 tgl 26 Juni 2019. |
| 2 | Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris | | X | | | | Dasar penetapan telah tercatat dalam risalah rapat dan SK Direksi yg telah mendapatkan persetujuan dari Dekom diantaranya SK Dir penetapan suku bunga simpanan , SK Dir pemberian kredit karyawan intern, SK Dir pembaharuan struktur organisasi, SK Dir batas pemberian kredit Fintech dll |
| 3 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material | | X | | | | BPR telah melakukan proses indentifikasi, pengukuran , pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko sesuai dengan pelaporan profil risiko inheren dan KPMR di tahun 2022 |
| 4 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh | | X | | | | BPR telah menerapkan Sistem pengendalian intern yg menyeluruh hal ini dibuktikan dng kelengkapan pemenuhan Struktur dan infrastruktur penerapan MR yg meliputi penunjukan PE Manrisk, penyusunan kebijakan MR dan penyusunan kebijakan aktivitas dan produk baru. |
| 5 | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Dasar penerapan SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 dan POJK No.13/POJK.03/2015 BPR telah melakukan penerapan atas 3 jenis Risiko yaitu risiko Inheren dan KPMR Kredit , Risiko Inheren dan KPMR Operasional dan Risiko Inheren dan KPMR Kepatuhan pada tahun 2022 |
| 6 | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh | | | X | | | BPR telah memiliki infrastruktur berupa prosedur, kebijakan dan Sistem informasi berupa core banking system yg dapat menyediakan data dan informasi secara lengkap , akurat , terkini dan utuh. |
| 7 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko | | | X | | | Pelatihan Manajemen Risiko telah dilaksanakan pada tgl.17 Januari 2022 , yg diadakan oleh Perbarindo yang bekerjasama dng Mandiri Consulting |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 16 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7 | | 2,29 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,92 | | | | | |

| C | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|---|---|--|
| HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Laporan profil Risiko semester I th 2022 telah dilaporkan dengan tertib berdasarkan surat pengantar No. 3077/TDN.03/4/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022, dan laporan profil risiko profil risiko semester II tahun 2022 akan disampaikan ke OJK maksimal akhir bln Januari 2023 |
| 2 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Dasar penerapan POJK No.25/POJK.03/2021 dan BPR telah menyampaikan laporan aktivitas baru kepada OJK perihal kerjasama Fintech dan SOP kepada OJK dengan surat pengantar No. 583/TDN.03/6/XII/2021 pada tgl.30 Desember 2021 dan surat permohonan lanjutan pengajuan kerjasama dng fintech komunal dng surat No.169/TDN.03/5/IV/2022 tanggal 12 April 2022 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 2,12 |
| TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,212 |

KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR | | X | | | | Dasar penerapan POJK No.4/POJK.3/2015. POJK No.33/POJK.03/2018 dan POJK No.49/POJK.03/2017 dan berdasar SOP perkreditan BPR 13/SK.Dir/BPR.TDN/III/2021 tgl 23 Maret 2021 dan kebijakan dan prosedur operasional perkreditan yang diberlakukan pada tgl 21 September 2021serta SOP pemberian kredit tdk langsung [chaneling] melalui Fintech PT. Komunal Finansial Indonesia yg diberlakukan pada tgl 01 Desember 2021 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan | | X | | | | Kebijakan sistem dan prosedur BMPK tercakup didalam kebijakan perkreditan BPR /PKPB BPR dan kebijakan BMPK telah dikinikan sesuai POJK No.23 th 2022 |
| 2 | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan | | X | | | | Dasar Penerapan POJK No.33/POJK.03/2018 terkait kualitas aktiva produktif dan PPAP dan sesuai POJK No. 49/POJK.03/2017 dan sesuai kebijakan perkreditan /PKPB BPR |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| C | | | | | | | HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
| 1 | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | | | | | | Dasar penerapan POJK No. 23/POJK.03/2022 dan sesuai kebijakan perkreditan /PKPB BPR | |
| 2 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | | | | | | Di sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK dan berdasarkan Penerapan POJK No.49/POJK.03/2017 dan sesuai kebijakan perkreditan /PKPB BPR | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | | | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | | 2,00 | | | | | | | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 2,00 |
| TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,150 |

KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR | X | | | | | Dasar penerapan POJK No15/POJK.03/2021 dan Rencana Bisnis tahun 2022 telah dilaporkan secara tertib pada tgl 14 Desember 2021 no. referensi : 205666-1-RBBPRK-R-A-20211231-010201-601086-11122020152236 dan Rencana Bisnis tahun 2023 telah dilaporkan kepada OJK pada tgl 12 Desember 2022 dengan adanya tanda bukti kirim aplikasi pelaporan online OJK(APOLO) no referensi : 512261-1-RBBPRK-R-A-20231231-010201-601086-18122022155744 |
| 2 | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | BPR telah mencantumkan rencana strategis dan rencana informasi lainnya berupa laporan penyelesaian kredit bermasalah, hapus buku, laporan inklusi dan literasi keuangan di dalam laporan Rencana bisnis BPR th 2022. |
| 3 | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | | X | | | | Telah terpenuhi di RBB 2022 perihal pemenuhan SDM, di tahun 2022 BPR belum ada penambahan Modal disetor dikarenakan telah memenuhi ketentuan modal inti 6 Milyard dan di tahun 2022 BPR telah membuka kantor kas di desa Tarik- Sidoarjo |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 5 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3 | | 1,67 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,84 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip | | X | | | | RBB telah disusun sesuai kondisi pd saat pandemi Covid-19 dan |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|---|
| | kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko | | | | | | penyesuaian kredit berdasarkan POJK 33/2018 dan untuk menjaga kelangsungan usaha BPR tetap sehat dan menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan MR |
| 2 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR | | X | | | | Hal ini dibuktikan dengan penyusunan laporan pengawasan Komisaris terhadap pelaksanaan rencana bisnis th 2022 yg dikirim melalui Aplikasi Apollo tgl 28 Januari 2022 dengan No. Referensi : 37419-1-REBPRKS-R-S-202111231-010201-601086-28012022123904 dan Rencana Bisnis tahun 2023 telah dilaporkan kepada OJK pada tgl 12 Desember 2022 dengan adanya tanda bukti kirim aplikasi pelaporan online OJK(APOLO) no referensi : 512261-1-RBBPRK-R-A-20231231-010201-601086-18122022155744 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |
| C | | | | | | | |
| HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | X | | | | Rencana bisnis Bank th 2022 telah dilaporkan secara tertib pada tgl 14 Desember 2021 No. referensi : 353961-2-RBBPRK-R-A-20221231-010201-601086-14122021092115 dan telah dilakukan revisi RBB berdasarkan permintaan OJK dan dikirim melalui APOLLO tgl 29 April 2022 No Referensi : 353961-2-RBBPRKA-K-A-20221231-010201-601086-29042022112023 dan Rencana Bisnis tahun 2023 telah dilaporkan kepada OJK pada tgl 12 Desember 2022 dengan adanya tanda bukti kirim aplikasi pelaporan online OJK(APOLO) no referensi : 512261-1-RBBPRK-R-A-20231231-010201-601086-18122022155744 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 2,00 | | | | | |

| | | |
|--|------|--|
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | 0,20 | |
|--|------|--|

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,84 |
| TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,138 |

KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | X | | | | | BPR telah melaporkan laporan keuangan dan non keuangan secara transparan kepada otoritas dan pihak lain. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 1 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 1,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,50 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | X | | | | | BPR telah menyampaikan laporan triwulan kepada otoritas sesuai POJK No.4/POJK.03/2015, dan POJK No.48/POJK.03/2017 perihal transparansi kondisi keuangan BPR |
| 2 | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | BPR telah tertib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK secara tertib dan untuk laporan LAI dan ML tahun buku 2021 telah disampaikan kepada OJK pada tgl 18 Maret 2022 |
| 3 | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | BPR telah mengenalkan produk melalui website BPR dan penyebaran brosur |
| 4 | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | BPR telah menyajikan dan menyusun laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan dalam ketentuan OJK di tahun 2021 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 7 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4 | | 1,75 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,70 | | | | | |

| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | X | | | | | Laporan tahunan th 2021 dan lap publikasi triwulan IV th 2021 telah dilaporkan kpd OJK pada tgl 13 April 2022 dengan surat pengantar No. 171/TDN.03/4/IV/2022 dan laporan Tahunan dan publikasi tw IV th 2021 |
| 2 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | | X | | | | Telah sesuai ketentuan dan telah dicantumkan didalam web BPR tentang transparansi produk dan telah disediakan kotak saran untuk pelayanan pengaduan nasabah |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 3 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | | 1,50 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,15 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,35 |
| TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,101 |